



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	5 ( <i>lima</i> )
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan para Direktur Utama PT Utama Karya (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 24 Juni 2020
Pukul	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pendalaman terkait BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2020.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), Budi Harto; 3. Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Arief Mulyadi, beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 09.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 24 Juni 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A..
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan penambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 dari PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 7.500.000.000.000 (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) untuk pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) untuk menjaga keberlangsungan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) khusus wanita pra-sejahtera.
2. Komisi VI DPR RI akan membahas penambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 kepada PT Utama Karya (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Utama Karya (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.32 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2020  
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.  
A-103